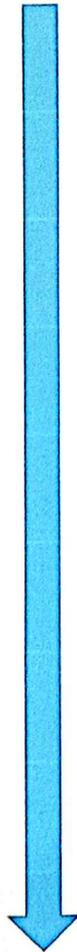




LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK (PPID)
PEMBANTU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH



TAHUN ANGGARAN 2025

A. Latar Belakang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah .

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hal untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik sesuai dengan perlakuan undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Atas dasar tersebut Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai komitmen yang kuat dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Maksud dan Tujuan

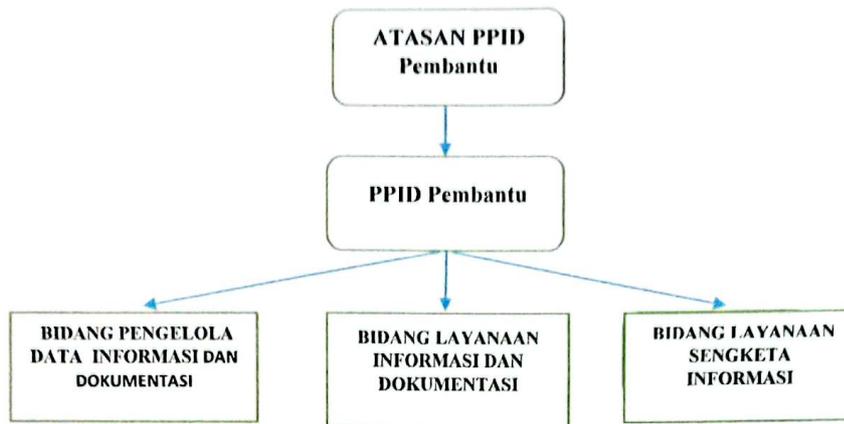
Maksud laporan ini sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kabupaten kepulauan Selayar khususnya Badan pegelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selama tahun 2024.

Tujuan untuk mendorong dan mengoptimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPID pembantu Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah serta meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2024 ini meliputi seluruh kegiatan pelayanan informasi publik, yang meliputi kegiatan penyediaan informasi publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pndapatan Daerah . Permohonan informasi dari permohonan informasi, keberatan dan sengketa informasi publik serta proses dan kegiatan layanan informasi publik pada Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah yang dilaporkan ke PPID Utama.

D Stuktur Organisasi PPID Pembantu



D. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

1. Sarana dan Prasarana Informasi Publik

Dalam pelaksana PPID pada Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah belum memiliki ruangan tersendiri dan belum memiliki petugas khusus namun pelayanan terkait dengan informasi di lakukan dengan akses yang sangat terbuka melalui informasi terbuka secara berkala di umumkan melalui website resmi <https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id> atau media lainnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi.

2. Sumber Daya Manusia

Pelayanan Informasi Publik melibatkan 1 (satu) Pejabat PPID Pelaksana, dan 2 (dua) orang admin yang bertugas setiap hari untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi baik melalui surat, datang langsung, whatsapp mesenger melalui website resmi BPKPD.(ppid://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id)

3. Operasional Pelayanan

Waktu Pelayanan Informasi Publik setiap hari kerja, namun diluar jam kerja layanan informasi dapat melalui website resmi <https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id>. Adapun Jam pelayanan pada PPID Pelaksana adalah sebagai berikut :

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin - Kamis	08.00 – 15.00 WITA	12.00- 13.00 WITA
Jum' at	08.00 – 15.00 WITA	11.00- 13.00 WITA

4. Jenis informasi publik

Jenis informasi pelayanan publik Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 1
Jenis informasi publik

No	Data / Dokumen	Berkala	Setiap saat	Serta merta	Keterangan
1	Kedudukan dan alamat	✓			https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
2	Profil BPKPD	✓			https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
3	Struktur organisasi BPKPD	✓			https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
4	Visi Misi	✓			https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
5	Sk PPID	✓			https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
6	Renstra BPKPD	✓			https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
7	Perjanjian Kinerja ASN	✓			https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
8	Lakip BPKPD	✓			https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
9	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	✓			https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
10	Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD)	✓			https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
11	Dftar Informasi publik	✓			https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
12	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	✓			https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
13	Opini BPK	✓			https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
14	Rencana Kerja (Renja)	✓			https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
15	Perkada tentang APBD	✓			https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
16	Perkada tentang APBD Perubahan	✓			https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
17	Kebijakan Umum Anggran (KUA)	✓			https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
18	Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)	✓			https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
19	Peta Nama Pejabat (Pemegang eselon)	✓			https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
20	Standar harga satuan biaya	✓			https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id

5. Rekapitulasi permohonan informasi publik Tahun 2024

Selama Tahun 2024, pemohon Informasi publik yang mengajukan permohonan secara tertulis Maupun melalui aplikasi belum ada, sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 2

Rekapitulasi permohonan informasi publik 2024

No	Informasi publik		Dipenuhi	Ditolak	Diproses	ket
	Pemohon	informasi				
1	-	-	-	-	-	-

6. Penyelesaikan Sengketa Informasi

Hingga saat ini PPID Pelaksana belum menangani kasus sengketa atau aduan keberatan terhadap permohonan informasi publik yang diajukan pemohon informasi, baik atasan PPID maupun pada komisi informasi Sulawesi Selatan, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3

Penyelesaikan Sengketa Informasi

No	Jumlah Keberatan	Tanggapan Keberatan	Permohonan penyelesaian sengketa		Hasil sengketa	Gugatan kepengadilan	Hasil putusan pengadilan	ket
			mediasi	ajudikasi				
1	0	0	0	0	0	0	0	

E. Permasalahan

Pelaksanaan tugas ,PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi publik menghadapi beberapa permasalahan, antar lain :

1. Keterbatasan Anggaran dan ruang dalam pemenuhan ruang sekretariat PPID pada BPKPD.
2. Peran dan fungsi PPID yang masih belum optimal dikarenakan kurangnya informasi terkait peranan PPID Pelaksana.
3. Penyediaan informasi internal tergantung suplay data dari masing masing bidang hal ini cukup penting mengingat waktu yang di perlukan hanya 10 hari kerja dan menjawab pemohon informasi
4. Belum optimalnya pengelolaan website PPID Pembantu untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.

5. Penyelenggaraan informasi publik belum di dudukkan sebagai prioritas dalam pelayanan publik.
6. Kecenderungan aktifitas kerja terfokus pada terselenggaranya agenda kegiatan dan aoutputnya.

F. Penutup

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat di pertanggungjawabkan.



KEPALA BADAN,
NURSAL IKHSAN, SE.M.Ak.M.Si
PANGKAT : PEMBINA TK. IV/b
NIP . 19830525 2006041 0 16